
KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Oleh

Maskur

Universitas Madako Tolitoli, Tolitoli, Sulawesi Tengah

E-mail: maskurmahmud5@email.com

Article History:

Received: 25-07-2026

Revised: 12-08-2026

Accepted: 28-08-2026

Keywords:

Income Inequality,
Economic
Development, Equity,
Poverty, Inclusive
Policy.

Abstract: *Indonesia's economic development continues to face the challenge of income inequality. Economic growth has not been evenly distributed, particularly among low-income populations and those living in underdeveloped regions. Furthermore, disparities in well-being are exacerbated by limited access to education, decent employment, public services, and productive resources. The objective of this study is to evaluate the relationship between income inequality and economic development challenges, as well as to identify the factors influencing this relationship. A quantitative descriptive method was employed, involving a review of the literature and an analysis of secondary data from official government publications and prior research. Data are examined to identify patterns of inequality, contributing factors, and their impact on development. Disparities in human resource quality, the concentration of economic activity, regional inequality, labor market structures, and access to assets are all factors that can lead to inequality. Such conditions can hinder the equitable distribution of growth benefits, reduce purchasing power, and limit social mobility. Targeted social protection policies, improvements in education quality, productive employment, and the strengthening of regional economies are all essential components of inclusive development.*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan produksi dan pendapatan nasional, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan tersebut dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat berkorelasi dengan ketimpangan pendapatan apabila keuntungan terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu. Akibatnya, untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, pemerataan kesempatan dan penyebaran hasil pembangunan merupakan komponen penting dari upaya tersebut. Tingkat pendapatan yang diterima seseorang atau rumah tangga dalam suatu masyarakat disebut sebagai ketimpangan pendapatan. Koefisien Gini adalah ukuran yang paling umum digunakan untuk menggambarannya. Nilai koefisien yang mendekati nol menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata, sedangkan nilai yang mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang lebih besar. Karena satu angka tidak selalu mencerminkan perbedaan kesempatan, kepemilikan aset, akses ke layanan dasar, dan

perbedaan antarwilayah, pengukuran ketimpangan harus dibaca dengan hati-hati. Simon Kuznets (1955) mengemukakan hipotesis teoretis bahwa ketika tenaga kerja berpindah dari sektor tradisional yang berproduktivitas rendah ke sektor modern yang berproduktivitas lebih tinggi, ketimpangan dapat meningkat pada tahap awal pembangunan. Setelah tahap pembangunan berikutnya, ketimpangan dapat menurun. Hipotesis ini bukan hukum natural. Struktur ekonomi, kebijakan publik, dan distribusi kesempatan memengaruhi perjalanan ketimpangan. Misalnya, Piketty (2014) menekankan bahwa disparitas dapat meningkat dalam kasus di mana pertumbuhan ekonomi lebih cepat daripada imbal hasil modal. Kedua perspektif tersebut menunjukkan bahwa pemahaman tentang perubahan distribusi pendapatan memerlukan mempertimbangkan dinamika ekonomi dan institusi yang membentuknya.

Dalam konteks Indonesia, masalah ketimpangan berkaitan dengan berbagai faktor, seperti perbedaan dalam kualitas pendidikan dan keterampilan, akses terhadap pekerjaan formal, kepemilikan aset, kemajuan teknologi, dan konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah tertentu. Selain itu, perbedaan dalam akses infrastruktur, layanan kesehatan, pembiayaan, dan pasar juga dapat memengaruhi kemampuan masyarakat untuk memperoleh pendapatan. Faktor-faktor ini saling berhubungan: misalnya, jika ada perbedaan dalam kualitas pendidikan dan keterampilan. Mobilitas sosial dapat dibatasi oleh ketimpangan yang tinggi, yang juga dapat mengurangi kemampuan sebagian orang untuk membeli barang. Jika kesempatan ekonomi terbatas, pertumbuhan mungkin tidak cukup untuk menghasilkan keuntungan yang merata atau meningkatkan partisipasi produktif. Sebaliknya, kebijakan pemerataan harus dibuat dengan mempertimbangkan keberlanjutan fiskal, efektivitas pelaksanaan, dan insentif untuk aktivitas ekonomi. Akibatnya, setiap diskusi tentang ketimpangan harus menghubungkan sumbernya dengan pengaruh mereka terhadap pembangunan serta kebijakan seperti peningkatan kualitas pendidikan, perluasan perlindungan sosial, penciptaan pekerjaan produktif, pemerataan infrastruktur, dan kebijakan perpajakan yang efektif. Hubungan ini dibahas dalam penelitian ini sebagai dasar untuk memahami kesulitan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan konsep dan teori ketimpangan pendapatan; (2) menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia; serta (3) membahas implikasi ketimpangan terhadap pembangunan ekonomi dan pilihan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan lebih inklusif. Dengan tujuan tersebut, penelitian diharapkan dapat menyajikan pemahaman yang terstruktur mengenai keterkaitan antara distribusi pendapatan, kesempatan ekonomi, dan arah kebijakan pembangunan. Fokus penelitian adalah sebagai berikut: 1) Definisi dan teori ketimpangan pendapatan, 2) Faktor-faktor apa yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia, dan 3) Bagaimana ketimpangan pendapatan berdampak pada pembangunan ekonomi, dan kebijakan apa yang dapat mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif. Studi ini hanya membahas teori tentang ketimpangan pendapatan dan komponen ekonomi dan sosial yang relevan di Indonesia. Analisis mencakup hubungan antara ketimpangan dan kemajuan ekonomi serta pilihan kebijakan yang dapat meningkatkan peluang dan merata keuntungan pertumbuhan. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur dampak kausal masing-masing faktor secara empiris atau membandingkan secara menyeluruh seluruh provinsi dan kelompok pendapatan. Pembahasan kebijakan juga bersifat analitis, dan tidak berfungsi

sebagai pengganti evaluasi rencana dan pelaksanaan program tertentu. Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pemahaman tentang konsep, teori, dan komponen yang berhubungan dengan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Secara praktis, diskusi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, mahasiswa, dan masyarakat dalam menilai hubungan antara pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu menemukan pendekatan kebijakan yang dapat memperluas akses ke pendidikan, pekerjaan produktif, peluang ekonomi, dan layanan dasar tanpa menganggap peningkatan ini sebagai peningkatan angka total. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) menjelaskan teori dan konsep tentang ketimpangan pendapatan; (2) menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia; dan (3) membahas dampak ketimpangan ini terhadap pembangunan ekonomi dan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.

TELAAH LITERATUR

1. Konsep Ketimpangan Pendapatan

Ketika pendapatan seseorang atau rumah tangga dalam suatu masyarakat tersebar secara tidak merata, itu disebut ketimpangan pendapatan. Perbedaan ini dapat dilihat antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah, antara individu dengan berbagai jenis pekerjaan, dan antara daerah dengan kesempatan ekonomi yang berbeda. Konsep ini penting untuk penelitian Ketimpangan Pendapatan dan Tantangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia karena pertumbuhan ekonomi tidak menjamin bahwa manfaat pembangunan dirasakan secara merata. Kemiskinan harus dibedakan dari ketimpangan. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana pendapatan atau sumber daya seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Di sisi lain, ketimpangan membandingkan distribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. Akibatnya, kemiskinan dapat menurun sementara ketimpangan tetap tinggi, misalnya ketika pendapatan kelompok bawah meningkat tetapi pendapatan kelompok atas tumbuh lebih cepat daripada yang mereka miliki. Sen (1999) mengingatkan bahwa pendapatan tidak harus menjadi satu-satunya cara untuk mengukur kesejahteraan dan pembangunan; juga penting untuk mempertimbangkan kemampuan seseorang untuk mendapatkan pendidikan, perawatan medis, pekerjaan, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Pendapat ini memperluas analisis ketimpangan dari perbedaan penghasilan ke perbedaan kesempatan dan kapabilitas.

Koefisien Gini adalah ukuran yang sering digunakan untuk menggambarkan distribusi pendapatan. Nilainya berkisar antara 0 dan 1, dengan nilai yang lebih rendah menunjukkan distribusi yang relatif merata, sedangkan nilai yang lebih tinggi menunjukkan konsentrasi pendapatan yang lebih besar. Kurva Lorenz, ukuran tambahan, membandingkan persentase kumulatif penduduk dengan persentase kumulatif pendapatan. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis pemerataan sempurna, semakin timpang distribusi yang digambarkan. Meskipun demikian, ukuran agregat seperti Gini tidak dapat menjelaskan semua faktor yang menyebabkan ketimpangan. Hal-hal seperti perbedaan dalam kepemilikan aset, akses terhadap layanan publik, atau perbedaan antardaerah tidak dapat dijelaskan oleh ukuran agregat seperti Gini. Kuznets (1955) menawarkan hipotesis kurva U terbalik dalam teori pembangunan. Hipotesis ini menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan, ketika sebagian tenaga kerja beralih dari sektor berproduktivitas rendah ke sektor modern,

ketimpangan dapat meningkat. Selanjutnya, seiring dengan meningkatnya kesempatan dan perubahan struktur ekonomi, ketimpangan dapat menurun. Hipotesis digunakan sebagai dasar untuk memahami pola hubungan yang mungkin terjadi antara pertumbuhan dan ketimpangan. Ini bukanlah aturan yang pasti yang berlaku untuk setiap negara. Kebijakan, keadaan pasar tenaga kerja, akses ke pendidikan, dan struktur kepemilikan aset dapat memengaruhi hasilnya. Piketty (2014) menawarkan perspektif tambahan yang menekankan kemungkinan peningkatan ketimpangan dalam situasi di mana pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang lebih cepat daripada peningkatan imbal hasil atas modal. Pemilik aset dalam situasi seperti ini mungkin menjadi lebih kaya lebih cepat daripada individu yang terutama bergantung pada upah. Gagasan ini menunjukkan betapa pentingnya melakukan perbedaan antara pendapatan dari pekerjaan dan pendapatan dari kepemilikan modal saat melihat distribusi ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, konsep ketimpangan pendapatan harus mencakup pembagian pendapatan antar individu dan perbedaan kesempatan antarkelompok sosial dan wilayah. Kemampuan masyarakat untuk menghasilkan uang dapat dipengaruhi oleh perbedaan kualitas pendidikan, akses pekerjaan formal, kepemilikan aset, infrastruktur, dan layanan dasar. Akibatnya, ketimpangan bukan hanya masalah hasil akhir, yaitu perbedaan pendapatan, tetapi juga masalah proses, yaitu siapa yang memiliki akses ke sumber daya dan siapa yang memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemahaman yang luas ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah pembangunan ekonomi Indonesia menghasilkan pertumbuhan yang dapat diikuti dan dinikmati oleh lebih banyak kelompok masyarakat.

2. Teori Kurva Kuznets

Teori Kurva Kuznets menjelaskan bagaimana pembangunan dapat menghubungkan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Hubungan dapat berbentuk kurva U terbalik, menurut Simon Kuznets (1955): ketimpangan cenderung meningkat di awal pembangunan, tetapi dapat menurun setelah ekonomi mencapai tingkat perkembangan tertentu. Gagasan ini membantu menjelaskan mengapa pemerataan tidak selalu diikuti oleh pertumbuhan ekonomi. Menurut hipotesis Kuznets, ketika perekonomian beralih dari sektor tradisional, seperti pertanian berproduktivitas rendah, ke sektor modern, seperti industri dan jasa, dapat terjadi peningkatan ketimpangan pada tahap awal. Perubahan ini tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian penduduk lebih dahulu beralih ke sektor modern untuk pekerjaan, keterampilan, dan pendapatan yang lebih tinggi, sementara kelompok lain tetap bergantung pada sektor tradisional. Akibatnya, disparitas pendapatan dapat meningkat di antara kelompok dan sektor. Pada tahap pembangunan berikutnya, ketimpangan diperkirakan dapat berkurang karena manfaat pertumbuhan menyebar lebih luas. Akses ke pekerjaan yang menguntungkan dapat ditingkatkan melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan, urbanisasi, kebijakan pajak dan perlindungan sosial, dan lebih banyak kesempatan kerja formal. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya faktor yang menurunkan ketimpangan; perubahan yang terjadi pada kebijakan publik dan struktur ekonomi juga berperan.

Dalam penelitian tentang tantangan pembangunan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia, Kurva Kuznets dapat digunakan sebagai kerangka untuk memeriksa apakah pola U terbalik terlihat dalam hubungan antara ketimpangan dan

pertumbuhan ekonomi. Tetapi pola tidak boleh diasumsikan berlaku otomatis; sebaliknya, mereka harus diuji menggunakan data dan teknik yang tepat. Menurut Kuznets (1955), hipotesis tersebut lebih baik dianggap sebagai proposisi yang dapat diuji daripada hukum universal karena data historis yang tersedia pada saat itu sangat terbatas. Untuk diterapkan di Indonesia, keragaman wilayah dan kelompok masyarakat harus dipertimbangkan. Pertumbuhan yang terkonsentrasi di kota-kota besar atau industri tertentu mungkin meningkatkan pendapatan nasional, tetapi belum tentu meningkatkan peluang ekonomi di tempat lain. Arah perubahan ketimpangan dapat dipengaruhi oleh perbedaan akses pendidikan, infrastruktur, pekerjaan berkualitas, dan kepemilikan aset. Oleh karena itu, penelitian dapat melihat bagaimana pertumbuhan dan ketimpangan berinteraksi. Secara kritis, Kurva Kuznets tidak menjamin bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mengurangi ketimpangan. Ketimpangan dapat bertahan atau meningkat jika hasil pertumbuhan terkonsentrasi pada kelompok tertentu atau peluang tetap terbatas. Akibatnya, pertanyaan penelitian dapat didasarkan pada teori ini. Namun, analisis teori ini harus disertai dengan studi tentang struktur ekonomi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan inklusif.

3. Teori Pertumbuhan Endogen dan Modal Manusia

Menurut teori pertumbuhan endogen, pertumbuhan ekonomi dapat didorong oleh proses di dalam perekonomian, bukan hanya oleh kemajuan teknologi dari luar. Produksi dapat meningkat secara berkelanjutan dengan investasi dalam pengetahuan, inovasi, keterampilan, dan pendidikan. Sementara Romer (1990) menekankan betapa pentingnya pengetahuan dan inovasi sebagai sumber pertumbuhan, Lucas (1988) menyatakan bahwa akumulasi modal manusia memiliki kemampuan untuk meningkatkan produktivitas individu sambil menghasilkan manfaat bagi perekonomian secara lebih luas. Modal manusia dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan kemampuan seseorang untuk bekerja dan berkontribusi dalam kegiatan ekonomi. Pelatihan dan pendidikan dapat meningkatkan modal manusia, yang berarti lebih banyak peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang produktif dan lebih banyak uang. Dengan demikian, investasi pada manusia bukan sekadar pengeluaran sosial; itu adalah salah satu pilar pertumbuhan yang akan dibangun dalam jangka panjang. Akses terhadap pendidikan, pelatihan, teknologi, dan kesempatan kerja yang baik adalah hubungan antara teori ini dan ketimpangan pendapatan. Manfaat pertumbuhan berbasis pengetahuan berisiko terkonsentrasi pada mereka yang telah memiliki keunggulan jika kesempatan untuk mengembangkan keterampilan hanya mudah dijangkau oleh kelompok atau wilayah tertentu. Akibatnya, perbedaan pendapatan dan produktivitas dapat lebih besar. Sebaliknya, akses yang lebih luas ke pelatihan dan pendidikan berkualitas tinggi dapat membuat lebih banyak pekerjaan produktif dan membantu orang berpendapatan rendah mendapatkan lebih banyak uang.

Dalam konteks Indonesia, teori pertumbuhan endogen dan modal manusia memberikan kerangka untuk memeriksa apakah investasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan inovasi mencapai inklusi masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan, kesetaraan layanan dasar, pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, dan dukungan untuk inovasi dan produktivitas adalah semua kebijakan yang relevan. Dengan demikian, peningkatan kapasitas masyarakat sekaligus mengurangi hambatan yang mempertahankan ketimpangan memungkinkan pertumbuhan ekonomi.

4. Pendekatan Kapabilitas dan Keadilan Distributif

Pendekatan kapabilitas mengevaluasi pembangunan berdasarkan kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang berharga, bukan hanya peningkatan ekonomi atau pendapatan. Sen (1999) membedakan kemampuan, yaitu peluang nyata untuk mencapai berbagai keadaan tersebut, dari hal-hal yang dapat dicapai seseorang, seperti menjadi sehat, berpendidikan, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Akibatnya, individu dengan pendapatan yang sama tidak selalu memiliki kesempatan hidup yang sama jika akses mereka terhadap layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, atau pekerjaan berbeda. Metode ini membantu dalam penelitian tentang ketimpangan pendapatan di Indonesia karena menunjukkan bahwa kesenjangan tidak hanya tercermin pada perbedaan penghasilan tetapi juga pada ketidakmerataan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kelompok tertentu mungkin memiliki kapasitas yang dibatasi oleh hambatan geografis, kualitas layanan publik, diskriminasi, dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan produktif. Oleh karena itu, evaluasi pertumbuhan ekonomi harus didasarkan pada apakah pertumbuhan tersebut benar-benar meningkatkan pilihan dan kesempatan masyarakat.

Keadilan distributif mengacu pada bagaimana keuntungan sosial-ekonomi dan tanggung jawab dibagi antara anggota masyarakat. Rawls (1971) mengusulkan prinsip bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika pengaturannya memberi manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung, dan posisi dan kesempatan terbuka secara adil bagi semua orang. Prinsip ini tidak berarti seluruh pendapatan harus sama, tetapi bahwa ketimpangan tidak merugikan kelompok dengan posisi paling rentan dan kesempatan sosial tidak ditentukan oleh latar belakang seseorang. Kedua metode bekerja sama. Berbeda dengan keadilan distributif, kapasitas menunjukkan aspek kesejahteraan yang harus dipertimbangkan, sedangkan keadilan distributif membantu menentukan apakah pembagian sumber daya dan kesempatan yang adil. Kerangka ini dapat digunakan untuk menyelidiki kesenjangan antarwilayah, perlindungan sosial, akses pekerjaan yang layak, dan pemerataan pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Kebijakan pembangunan yang adil tidak hanya berusaha meningkatkan pendapatan nasional tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat dan menjamin bahwa orang-orang yang kurang beruntung memiliki kesempatan yang lebih baik. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui pembagian keuntungan dan kebebasan nyata yang dihasilkan.

5. Ketimpangan dan Pembangunan Ekonomi

Ketimpangan pendapatan menggambarkan perbedaan distribusi penghasilan antarindividu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian pembangunan ekonomi, ketimpangan perlu dikaji bersama pertumbuhan karena kenaikan pendapatan nasional tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk secara merata. Ketika tenaga kerja berpindah dari sektor berproduktivitas rendah ke sektor modern, ketimpangan dapat meningkat pada tahap awal pembangunan, yang dikenal sebagai kurva Kuznets. Hipotesis ini, yang dikenal sebagai kurva Kuznets, bukan hukum universal karena pola ketimpangan dapat berbeda menurut struktur ekonomi dan kebijakan setiap negara.

Hubungan antara ketimpangan dan kemajuan juga dipengaruhi oleh sumber daya dan kesempatan ekonomi. Aghion, Caroli, dan Garcia-Penalosa (1999) menjelaskan bahwa ketimpangan dapat mempengaruhi pertumbuhan melalui berbagai cara, seperti perbedaan dalam akses ke pendidikan dan investasi. Rumah tangga berpendapatan rendah tidak dapat

mengembangkan potensi ekonomi mereka secara optimal ketika mereka menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pendidikan, modal, atau pekerjaan produktif. Pada akhirnya, kondisi ini dapat mengganggu mobilitas sosial dan mengurangi pemanfaatan sumber daya manusia.

Dalam hal Indonesia, kerangka ini dapat digunakan untuk menilai apakah pertumbuhan ekonomi disertai dengan peningkatan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, dan akses yang lebih merata terhadap kegiatan ekonomi dan layanan dasar. Pengalaman ketimpangan dapat beragam karena perbedaan kondisi di antara wilayah, organisasi pekerjaan, dan akses ke infrastruktur dan pendidikan. Akibatnya, analisis harus mempertimbangkan tidak hanya peningkatan PDB tetapi juga distribusi pendapatan dan kesempatan. Salah satu kendala dalam pembangunan ekonomi Indonesia adalah menggabungkan pertumbuhan yang produktif dengan inklusif. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, kebijakan seperti peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan infrastruktur, menciptakan pekerjaan layak, dan meningkatkan perlindungan sosial dapat membantu. Penelitian ini memahami ketimpangan sebagai bukan hanya hasil pembangunan tetapi juga komponen yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan harus diukur dari pertumbuhan ekonomi, siapa yang memperoleh keuntungan, dan apakah ada lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis sebagai desain. Perkembangan indikator pembangunan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia digambarkan melalui pendekatan deskriptif. Sementara itu, analisis kuantitatif menemukan hubungan antara ketimpangan dan indikator pembangunan tertentu. Karena peneliti tidak melakukan perlakuan atau intervensi terhadap variabel ini, penelitian ini bersifat observasional. Studi ini berfokus pada Indonesia. Misalnya, periode pengamatan ditetapkan dari 2010 hingga 2024, bergantung pada kelengkapan dan keseragaman data. Jika data tersedia berdasarkan provinsi, unit analisis dapat diperluas menjadi provinsi-tahun untuk melihat perbedaan antarprovinsi.

Data sekunder dalam bentuk panel atau deret waktu digunakan. Data seperti indikator distribusi pendapatan, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan ketenagakerjaan dapat diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Data tentang investasi, pendidikan, atau kesehatan juga dapat diperoleh dari publikasi pemerintah dan lembaga resmi yang relevan. Definisi, satuan, cakupan wilayah, tahun pengamatan, dan tautan atau judul publikasi disertakan dalam setiap data. Variabel dan Definisi Operasional, Variabel utama penelitian meliputi: Ketimpangan pendapatan (Y): dihitung dengan rasio Gini yang diterbitkan BPS. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan distribusi pendapatan atau pengeluaran yang lebih timpang, menurut definisi sumber data. Pertumbuhan ekonomi (X1) menunjukkan persentase pertumbuhan baik Produk Domestik Bruto (PDB) riil maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kemiskinan (X2) menunjukkan persentase populasi yang berada di bawah garis kemiskinan. Pengangguran (X3) adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pendidikan (X4) adalah indikator yang dipilih secara konsisten, seperti lama sekolah rata-rata. Pilihan variabel akhir harus disesuaikan dengan

pertanyaan penelitian dan jumlah data yang tersedia. Fakta bahwa ada hubungan statistik tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat.

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi. Peneliti melihat laporan resmi dan tabel statistik, lalu memasukkan angka ke lembar kerja. Data diperiksa untuk memastikan bahwa tahun, wilayah, satuan, dan definisi tetap sama. Selain itu, jika ada perubahan pada definisi indikator atau metode penghitungan, perubahan tersebut dicatat dan diperhitungkan dalam analisis. Analisis dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, statistik deskriptif dan grafik digunakan untuk melihat pola tiap indikator. Kedua, data diperiksa untuk menemukan nilai kosong, perubahan satuan, atau pencilan. Ketiga, hubungan antarvariabel dianalisis melalui korelasi dan, bila sesuai, regresi. Contoh model awal ialah: Setelah menguji kesesuaian model dan asumsi statistik, model panel dapat dipertimbangkan jika data provinsi dan tahun digunakan. $Ginit = 0 + 1 \text{ Pertumbuhant} + 2 \text{ Kemiskinan} + 3 \text{ TPTt} + 4 \text{ Pendidikant} + t \text{ Koefisien}$, tingkat signifikansi, dan keterbatasan interpretasi digunakan untuk melaporkan hasil. Keabsahan dijaga dengan mengutamakan sumber resmi, mencocokkan data antar publikasi, dan menerapkan definisi variabel secara konsisten. Keterbatasan dapat mencakup data yang tidak lengkap, perbedaan metode pengukuran, serta variabel penting yang tidak tercakup. Keterbatasan tersebut perlu dijelaskan agar kesimpulan tidak digeneralisasi melampaui cakupan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dan Teori Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merujuk pada tidak meratanya distribusi pendapatan atau sumber daya ekonomi di antara individu, rumah tangga, maupun kelompok masyarakat. Ketimpangan dapat dilihat dari perbedaan pendapatan, kepemilikan aset, akses terhadap pekerjaan, dan kesempatan memperoleh pendidikan serta layanan dasar. Ukurannya antara lain rasio Gini, pangsa pendapatan kelompok tertentu, dan perbandingan pendapatan antarkelompok atau antarwilayah. Rasio Gini mendekati nol menunjukkan distribusi yang lebih merata, sedangkan nilai yang lebih tinggi menunjukkan ketimpangan yang lebih besar. Namun, satu ukuran saja tidak selalu cukup untuk menggambarkan seluruh dimensi ketimpangan. Kuznets (1955) mengemukakan hipotesis dalam teori pembangunan bahwa ketimpangan dapat meningkat pada tahap awal transformasi ekonomi dan kemudian menurun seiring pertumbuhan ekonomi dan penyebaran kesempatan. Pada awalnya, perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional yang berproduktivitas rendah ke sektor modern dapat membuat perbedaan menjadi lebih besar, karena kelompok yang memiliki keterampilan, modal, atau akses ke pusat ekonomi lebih dahulu menerima manfaat perubahan. Meskipun demikian, kurva Kuznets tidak selalu berlaku secara otomatis di semua negara. Struktur ekonomi, kebijakan publik, dan distribusi kesempatan semuanya berkontribusi pada arah ketimpangan.

Menurut perspektif lain, ketimpangan dapat berdampak pada proses pertumbuhan selain merupakan hasil pembangunan. Ketika masyarakat berpendapatan rendah menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi, pembiayaan, aset produktif, dan pekerjaan yang layak, mereka tidak dapat meningkatkan produktivitas mereka. Perbedaan dalam kemampuan berinvestasi dan mengembangkan keterampilan adalah salah satu dari banyak saluran yang menghubungkan ketimpangan dengan

pertumbuhan, seperti yang dibahas oleh Aguion, Caroli, dan Garcia-Penalosa (1999). Akibatnya, ketimpangan yang tinggi dapat menghambat pemanfaatan potensi manusia dan menghambat dasar pertumbuhan ekonomi.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketimpangan di Indonesia

Kajian ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Indonesia perlu dipahami sebagai hasil interaksi faktor struktural dan geografis. Pertama, perbedaan kesempatan kerja dan produktivitas antarsektor berperan penting. Pekerja di sektor formal, industri modern, dan jasa berproduktivitas tinggi umumnya memiliki peluang memperoleh pendapatan lebih besar dibandingkan pekerja informal atau pekerja dengan produktivitas rendah. Apabila penciptaan pekerjaan berkualitas tidak sejalan dengan pertumbuhan angkatan kerja, sebagian masyarakat akan tertahan pada pekerjaan berupah rendah dan tidak stabil. Kedua, tingkat pendidikan dan keterampilan memengaruhi peluang pekerjaan dan pendapatan. Kemampuan dapat berkembang lebih jauh jika ada perbedaan dalam akses ke pendidikan berkualitas tinggi, pelatihan, teknologi, dan informasi pasar kerja. Pendidikan yang lebih lama tidak selalu menjamin pekerjaan yang menguntungkan, tetapi memiliki keterampilan yang tepat dapat membantu Anda lebih produktif dan memiliki lebih banyak pekerjaan untuk dipilih. Oleh karena itu, hubungan antara pendidikan dan ketimpangan juga bergantung pada kualitas pendidikan dan kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan ekonomi.

Ketiga, mobilitas ekonomi dapat dibatasi oleh perbedaan dalam kepemilikan aset dan modal. Rumah tangga yang memiliki tanah, tabungan, jaringan usaha, atau akses ke pembiayaan lebih mudah berinvestasi dan bertahan dalam keadaan ekonomi yang bergejolak. Namun, keluarga yang tidak memiliki aset produktif lebih rentan terhadap kehilangan pekerjaan, biaya kesehatan, dan perubahan harga. Ketika anak-anak yang kurang mampu memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pendidikan dan peluang kerja, ketimpangan aset dapat berlanjut lintas generasi. Keempat, pola ketimpangan juga disebabkan oleh perbedaan dalam pembangunan wilayah. Di daerah tertentu, konsentrasi kegiatan ekonomi, infrastruktur, layanan publik, dan investasi dapat memengaruhi produktivitas dan kesempatan kerja. Tempat-tempat yang jauh dari pusat pasar atau memiliki akses terbatas menghadapi biaya distribusi yang lebih tinggi dan kesempatan usaha yang lebih sedikit. Namun, perbedaan di suatu wilayah tidak berdiri sendiri; pemerintahan yang baik, struktur industri, lokasi geografis, dan ketersediaan layanan dasar semua berkontribusi pada hal ini.

Kelima, distribusi manfaat pertumbuhan dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam teknologi, struktur pasar, dan kebijakan fiskal. Apabila pajak dan belanja publik dirancang secara progresif dan ditujukan untuk kelompok yang paling membutuhkan, mereka memiliki potensi untuk mengurangi kesenjangan. Sebaliknya, kelompok yang memiliki sumber daya dapat menikmati manfaat kebijakan yang lebih besar jika mereka memiliki akses yang tidak merata terhadap layanan atau dukungan ekonomi. Teknologi juga dapat meningkatkan produktivitas, tetapi keuntungan mungkin tidak merata jika keterampilan digital dan akses infrastruktur terbatas.

3. Implikasi terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pilihan Kebijakan

Ketimpangan pendapatan berimplikasi pada kualitas dan keberlanjutan pembangunan. Apabila sebagian besar manfaat pertumbuhan terkonsentrasi, daya beli kelompok

berpendapatan rendah dapat tertahan. Hal ini berpotensi membatasi perluasan pasar domestik dan mengurangi kemampuan rumah tangga untuk berinvestasi pada pendidikan, kesehatan, serta usaha produktif. Ketimpangan kesempatan juga dapat menghambat mobilitas sosial: kemampuan seseorang untuk memperbaiki kondisi hidupnya menjadi terlalu bergantung pada latar belakang keluarga atau wilayah tempat tinggal.

Selain itu, ketimpangan yang bertahan lama dapat merusak kredibilitas lembaga dan kebijakan publik, terutama ketika orang percaya bahwa kesempatan ekonomi tidak terbuka. Dampak tidak terjadi secara konsisten dan tidak dapat disimpulkan hanya dari satu indikator. Akibatnya, penelitian harus membedakan ketimpangan hasil seperti ketimpangan pendapatan dari ketimpangan kesempatan, seperti ketimpangan akses ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Perluasan akses terhadap pendidikan berkualitas tinggi dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja harus menjadi prioritas kebijakan pertama. Kebijakan ini harus mencakup peningkatan kualitas instruksi, dukungan bagi siswa dari keluarga berpendapatan rendah, dan pelatihan ulang bagi karyawan yang terkena dampak perubahan teknologi. Kedua, melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan akses pembiayaan, dan perbaikan lingkungan usaha, pemerintah memiliki kemampuan untuk mendorong penciptaan pekerjaan. Bukan hanya bantuan jangka pendek, dukungan ini harus disertai dengan peningkatan produktivitas, perlindungan karyawan, dan akses ke pasar. Ketiga, wilayah yang tidak memiliki akses harus diprioritaskan untuk mendapatkan akses ke infrastruktur dan layanan dasar yang setara. Sektor-sektor seperti transportasi, konektivitas digital, air bersih, kesehatan, dan pendidikan dapat memberi masyarakat lebih banyak kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi. Keempat, perlindungan sosial yang tepat sasaran dapat membantu rumah tangga menghadapi guncangan dan mempertahankan pendidikan dan kesehatan yang berkelanjutan. Untuk memastikan bahwa program perlindungan sosial mencakup cukup, dilaksanakan dengan akuntabel, dan membantu kelompok rentan, evaluasi rutin diperlukan. Kelima, melalui belanja publik yang efektif dan penerimaan yang adil, kebijakan fiskal dapat membantu inklusi. Penguatan layanan publik dan bantuan yang terarah dapat membantu mengurangi hambatan ekonomi, tetapi evaluasi insentif harus memastikan bahwa keuntungan tidak terbatas pada kelompok tertentu. Pertumbuhan, penciptaan kerja, kesempatan yang sama, dan perlindungan sosial harus saling melengkapi dalam paket kebijakan.

Secara keseluruhan, diskusi ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia tidak hanya meningkatkan laju pertumbuhan, tetapi juga memberikan masyarakat kesempatan yang lebih besar untuk berkontribusi dan memanfaatkannya. Untuk menguji kesimpulan ini, data harus diuji menurut waktu, wilayah, dan kelompok sosial. Penelitian lanjutan dapat menggabungkan indikator rasio Gini dengan data tentang kemiskinan, pekerjaan, pendidikan, dan akses layanan. Ini akan memungkinkan analisis yang lebih akurat tentang hubungan antara ketimpangan dan pembangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan diskusi sebelumnya, ketimpangan pendapatan adalah ketika pendapatan dan kesempatan ekonomi tidak merata di antara individu, kelompok, atau wilayah. Untuk menghitung ketimpangan, rasio Gini dapat digunakan; namun, untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang distribusi kesejahteraan, metrik ini harus

dikombinasikan dengan metrik lain. Menurut teori Kuznets, ketimpangan mungkin meningkat pada awal transformasi ekonomi dan kemudian berkurang pada tahap berikutnya. Meskipun demikian, perubahan ini tidak terjadi secara otomatis. Struktur ekonomi, kebijakan yang diterapkan, dan pemerataan kesempatan menentukan arah ketimpangan. Sejumlah variabel yang saling berkaitan memengaruhi ketimpangan di Indonesia. Pekerja di sektor informal atau berupah rendah biasanya memiliki peluang pendapatan yang lebih rendah daripada pekerja di sektor formal karena perbedaan produktivitas dan upah yang ada di antara sektor tersebut. Peluang untuk menghasilkan lebih banyak uang juga dipengaruhi oleh ketidakmampuan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi, keterampilan, teknologi, dan pekerjaan yang layak. Kemampuan rumah tangga untuk berinvestasi dan menghadapi guncangan ekonomi juga dapat dibatasi oleh perbedaan dalam kepemilikan aset dan pembiayaan. Perbedaan kesempatan di antara wilayah dipengaruhi oleh bagaimana kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan layanan publik dikonsentrasikan di wilayah tertentu.

Ketimpangan yang tinggi dapat menjadi tantangan pembangunan ekonomi karena membatasi kemampuan sebagian masyarakat untuk meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan kesejahteraan. Ketika akses terhadap layanan dasar dan pekerjaan produktif tidak merata, manfaat pertumbuhan dapat terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Kondisi ini dapat menghalangi pertumbuhan yang berkelanjutan dan mempersempit partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Namun, kesimpulan tentang dampak ketimpangan tidak dapat dibuat hanya dengan melihat satu indikator; kesimpulan ini perlu didukung oleh pengujian data. Kebijakan harus memadukan peningkatan produktivitas dengan pemerataan kesempatan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif. Peningkatan pendidikan dan pelatihan kerja, penciptaan pekerjaan produktif, dukungan bagi usaha kecil, dan peningkatan akses ke pembiayaan dan teknologi adalah tujuannya. Pemerataan infrastruktur dan layanan dasar sangat penting untuk memungkinkan wilayah yang tertinggal terhubung dengan pasar dan memperoleh kesempatan ekonomi yang lebih besar. Belanja publik dan perlindungan sosial yang efektif juga dapat membantu rumah tangga rentan menghadapi guncangan dan mempertahankan akses mereka ke pendidikan dan kesehatan.

Oleh karena itu, penilaian pembangunan ekonomi Indonesia tidak hanya berdasarkan pertumbuhan agregat; keberhasilannya juga harus diukur dari seberapa luas masyarakat dapat berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan. Untuk mengurangi hambatan struktural dan mendorong pertumbuhan yang inklusif, kebijakan yang konsisten, tepat sasaran, dan dievaluasi berdasarkan data terpilah berdasarkan kelompok sosial dan wilayah diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghion, P., Caroli, E., & García-Penalosa, C. (1999). *Inequality and economic growth: The perspective of the new growth theories*. Journal of Economic Literature, 37(4), 1615–1660. <https://doi.org/10.1257/jel.37.4.1615>.
- Kuznets, S. (1955). *Economic growth and income inequality*. The American Economic Review, 45(1), 1–28.
- Lucas, R. E. (1988). *On the mechanics of economic development*. Journal of Monetary

Economics, 22(1), 3–42. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(88\)90168-7](https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7).

Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty First Century*. Harvard University Press. Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

Romer, P. M. (1990). *Endogenous technological change*. Journal of Political Economy, 98(5, Part 2), S71–S102. <https://doi.org/10.1086/261725>.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Alfred A. Knopf.